

RENCANA KERJA (RENJA)

**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN TASIKMALAYA**

TAHUN 2017



**PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
Jl. Pemuda No. 1 Telp. (0265) 336438 Tasikmalaya**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas perkenan- Nya kami dapat menyusun Rencana Kerja dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang akan berjalan selama Tahun 2017 terutama untuk merencanakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Kerjai tahunan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya dalam merealisasikan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama Tahun 2017.

Rencana Kerja ini dapat dijadikan sebagai ukuran dalam rangka meningkatkan akses kualitas pelayanan, pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Akhirnya semoga pembuatan Rencana Kerja dapat berguna khususnya bagi Kantor Kesbang dan Linmas sebagai upaya untuk memonitoring dalam pelaksanaan urusan yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan umum.

Tasikmalaya, Februari 2017

**KEPALA KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA**



WAN RIDWAN, S.IP
Pembina Tk.I
NIP. 19641201 198603 1 013

BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah memuat pengertian Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja merupakan perencanaan yang dirumuskan secara matang dengan mempertimbangkan segala kemungkinan, termasuk resiko yang harus dihadapi guna mencapai tujuan organisasi.

Dalam penyusunan Renstra SKPD dalam hal ini Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya mengacu pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016- 2021. Untuk menjaga kesinambungan dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Visi Kabupaten Tasikmalaya tahun 2016-2021, **“Tasikmalaya yang Religius Islami, Unggul di Bidang Agroindustri dan Pariwisata Berbasis Perdesaan”**. Sedangkan untuk Misi Kabupaten Tasikmalaya yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Beriman dan Bertaqwa, Berakhlakulqarimah dan Berkualitas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Tangguh Berbasis Perdesaan dengan Keunggulan Agroindustri dan Pariwisata;
3. Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*);
4. Meningkatkan Kediaan Kualitas Infrastruktur Wilayah Berbasis Tata Ruang yang Berkelanjutan.

Pada Tahun 2016-2021 Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dibawah kepemimpinan Bupati Uu Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto. Adapun untuk melayani masyarakat Kabupaten Tasikmalaya membuat slogan **TASIK SIAP** yang terdiri atas :

1. SIAP 1 : Memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pelayanan dasar.
2. SIAP 2 : Menjadikan Sumber Daya Manusia berakhlak dan berkualitas.
3. SIAP 3 : Berdaya saing dibidang agribisnis, pariwisata, UMKM dan ekonomi kreatif.
4. SIAP 4 : Mendayagunakan teknologi informasi.
5. SIAP 5 : Menjamin kemudahan investasi.

Perencanaan harus dirumuskan secara komprehensif dan integratif dan menjadi unsur yang sangat penting dalam berbagai hal upaya pengambilan kebijakan, aplikasi operasional di lapangan serta diharapkan dapat menciptakan sinergitas yang baik dan produktif terhadap pengembangan tugas, fungsi dan wewenang pemerintahan daerah pada umumnya. Dengan perencanaan yang baik tentunya diharapkan output atau sasaran yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan efektif, efisien dan bernilai guna secara optimal.

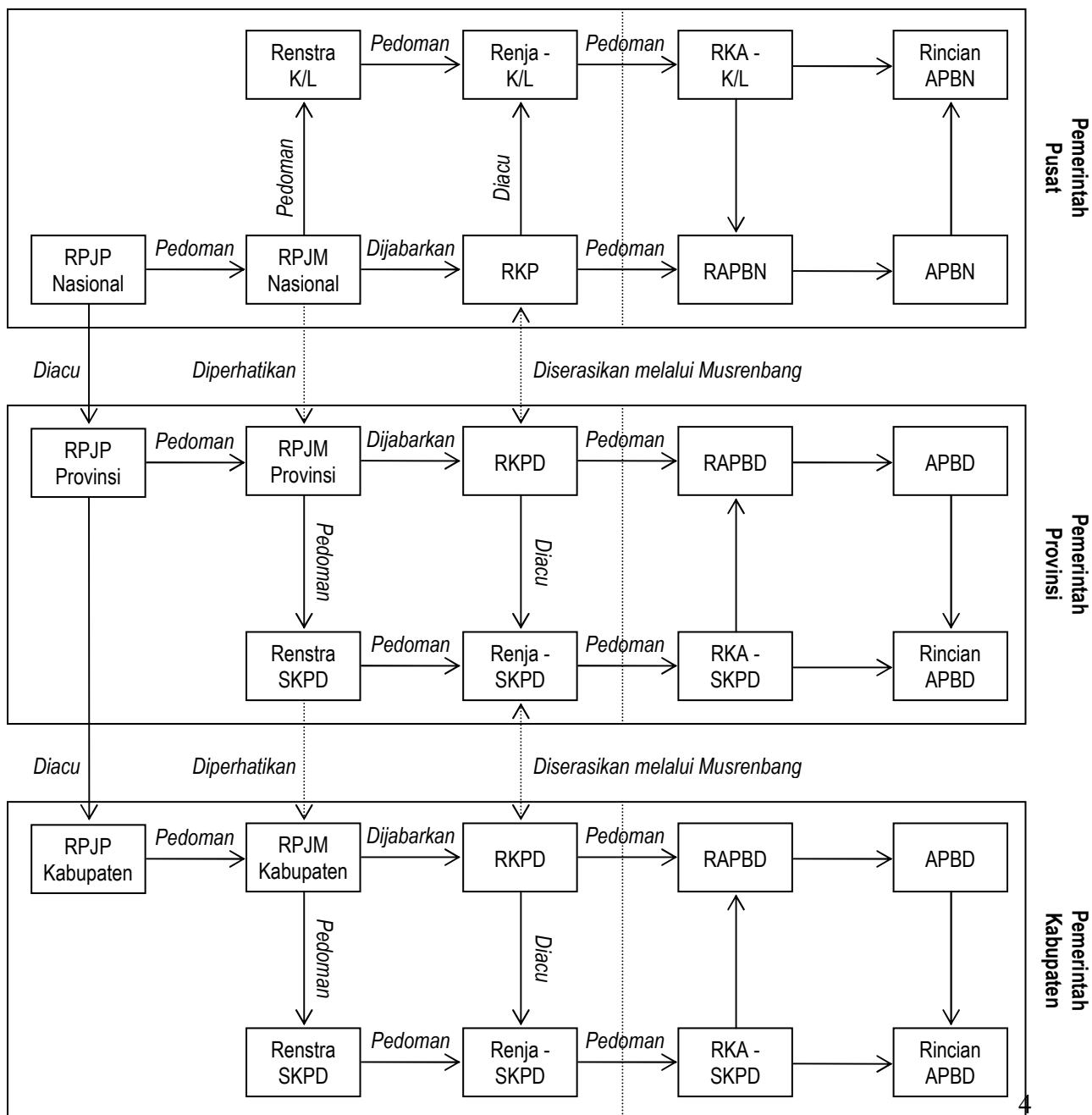
Dalam melaksanakan pembangunan daerah diperlukan sebuah perencanaan (*planning*) hal ini dimaksudkan agar apa yang dilaksanakan pemerintah menjadi terarah. Rencana kerja merupakan acuan yang berupa dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Rencana Kerja (Renja) SKPD dibuat selama satu tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitive. Dalam prosesnya , penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/pararel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan focus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap eksisting SKPD,evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun – tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

HUBUNGAN RENJA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINGKUNGAN MASYARAKAT DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

Dalam menyusun Renja Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya memiliki keterkaitan yang erat dengan dokumen perencanaan yang lainnya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra diajukan sebagai acuan dalam penyusunan Renja Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017.

Hubungan Renja SKPD Kabupaten Tasikmalaya dengan Dokumen Perencanaan Lainnya Tahun 2017



1.2 LANDASAN HUKUM

Dalam penyusunan Renja (Rencana Kerja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya didasarkan pada Tahun 2017:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 923 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Tasikmalaya dari Wilayah Kota Tasikmalaya ke Singaparna di Wilayah Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 110);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5539);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887);

19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor (SE Mendagri) No. 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016 tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017;
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2010 Nomor 7);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tasikmalaya 2011-2031;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor 10);
30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan dari Rencana Kerja adalah agar langkah-langkah yang telah ditetapkan dapat terarah sehingga rencana dari Organisasi Perangkat Daerah dapat tercapai sesuai dengan tujuan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan misi. Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 tahun.

Adapun tujuannya adalah :

1. Pedoman kerja tahunan SKPD dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan dibidang pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan tahunan;

3. Penjabaran APBD tahun berkenaan yang disesuaikan dengan tugas, pokok dan fungsi SKPD.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya akan mengetahui aspek-aspek apa saja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 1 tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki serta faktor lain baik teknis maupun non teknis yang dapat mempengaruhinya.

1.3 VISI DAN MISI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN LINMAS

Berpedoman pada Visi dan Misi Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, melihat kondisi umum, masalah dan tantangan yang dihadapi, serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka Visi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 – 2021 dirumuskan sebagai berikut :

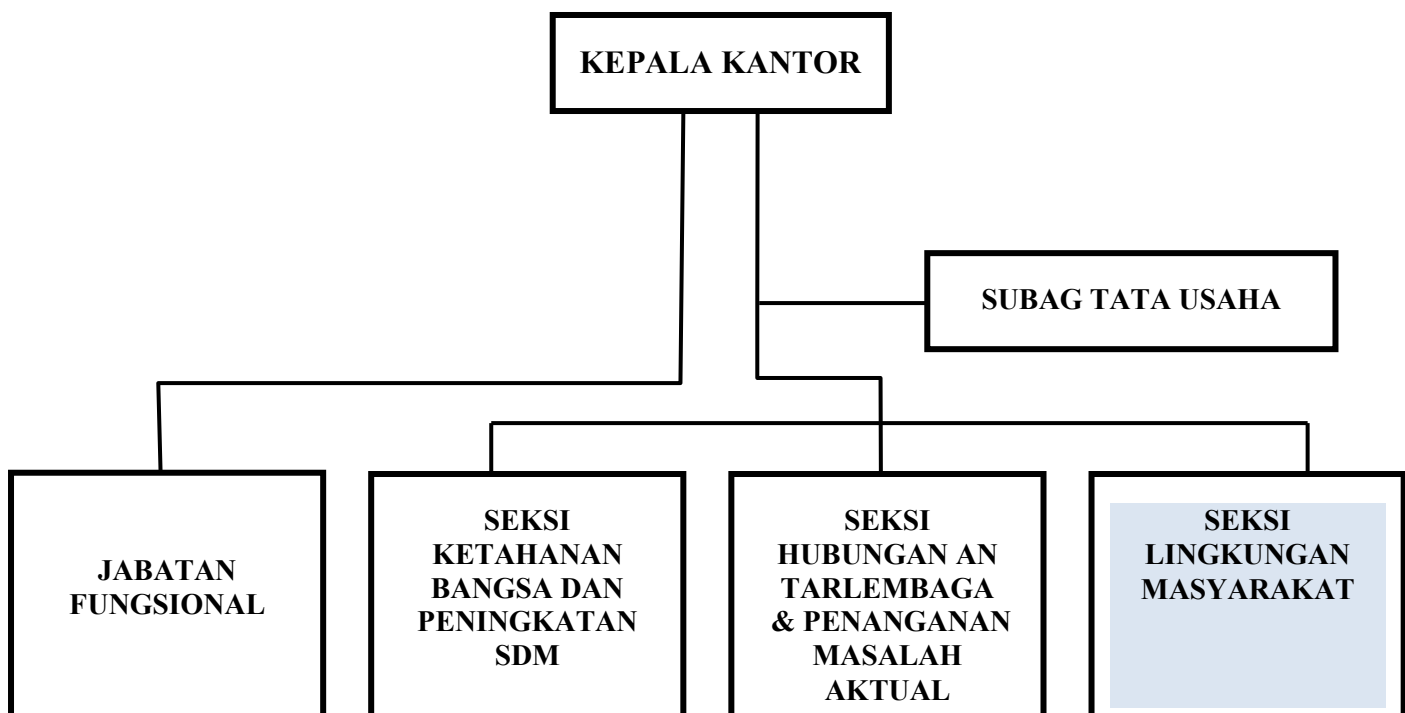
**Terwujudnya Persatuan dan Kesatuan Bangsa yang Kokoh dalam
Kehidupan Berpolitik yang Demokratis, dan Meningkatnya Wawasan
Kebangsaan Tahun 2021”**

Tujuan	Sasaran
3	4
Meningkatnya efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kesbang dan Linmas

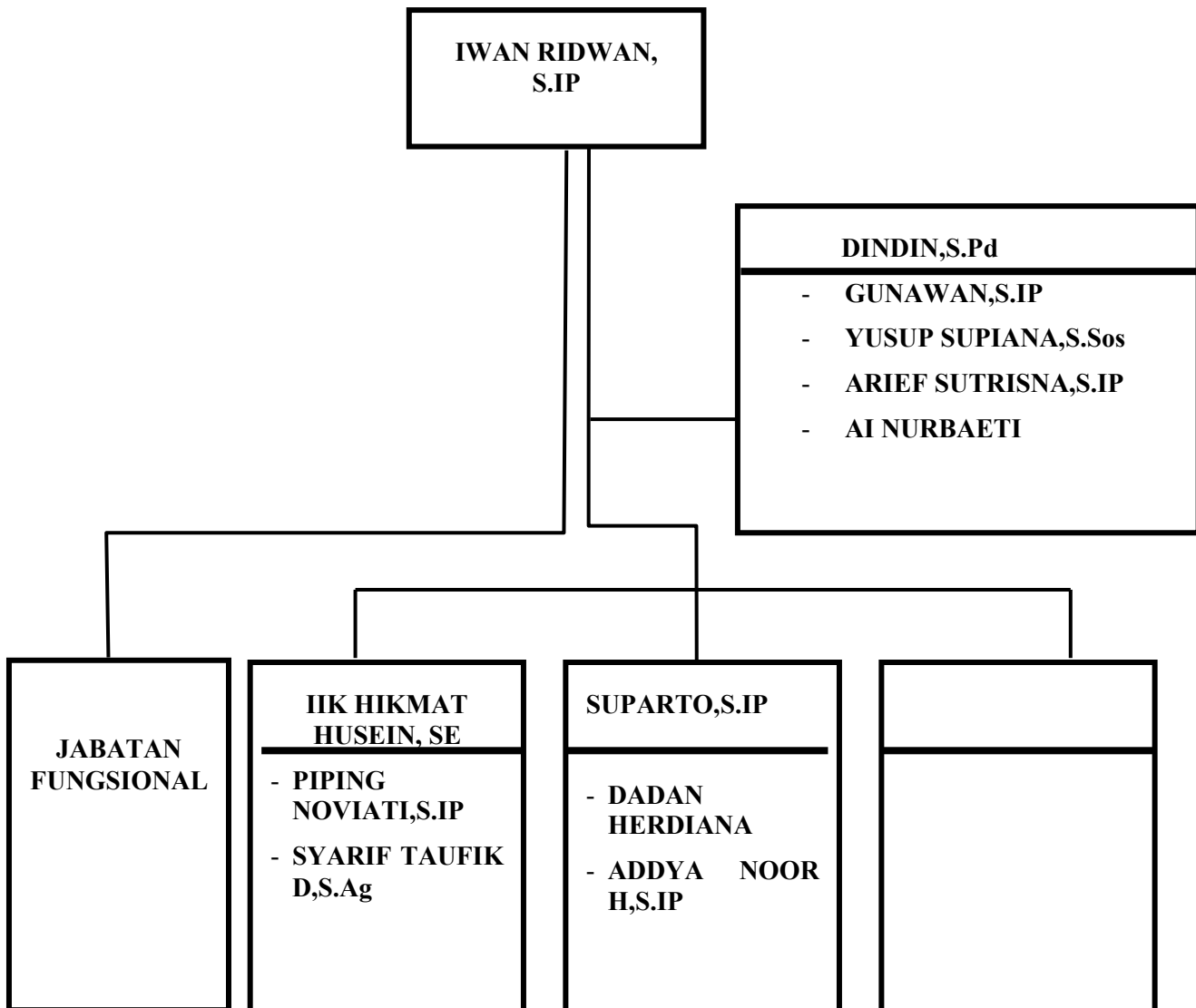
	Meningkatnya kebebasan politik masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Rumusan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut atas arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021 dan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pemerintah terkait yang perlu dilakukan dan/atau tindak lanjut Kantor Kesbang dan Linmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**STRUKTUR ORGANISASI
KANTOR KESBANG DAN LINMAS
KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2017**



SUMBER DAYA MANUSIA



1.4 SUSUNAN KEPEGAWAIAN DAN PERLENGKAPAN

A. Susunan Kepegawaian

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat memiliki jumlah pegawai sebanyak 13 orang dengan rincian sebagai berikut :

**Komposisi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Berdasarkan Status Kepegawaian**

Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13 orang
Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	- orang
Tenaga Kerja Sukarela (TKS)	3 orang
Jumlah	16 orang

Menurut hasil penelitian, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) berkorelasi positif terhadap kinerja suatu organisasi, sehingga upaya untuk meningkatkan kualitas SDM perlu senantiasa dilakukan. Upaya tersebut antara lain dilakukan melalui penambahan kemampuan teknis manajerial baik melalui jalur pendidikan formal (swadana atau beasiswa) maupun melalui kegiatan pendidikan latihan (diklat) teknis ataupun fungsional.

Berdasar jenjang pendidikan, di Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya saat ini sebagian besar telah menempuh pendidikan sarjana, dengan rincian sebagai berikut :

**Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Berdasar Tingkat Pendidikan**

S2	2 orang
S1	9 orang

D3	-
SMA	2 orang
SMP	- orang
Jumlah	13 orang

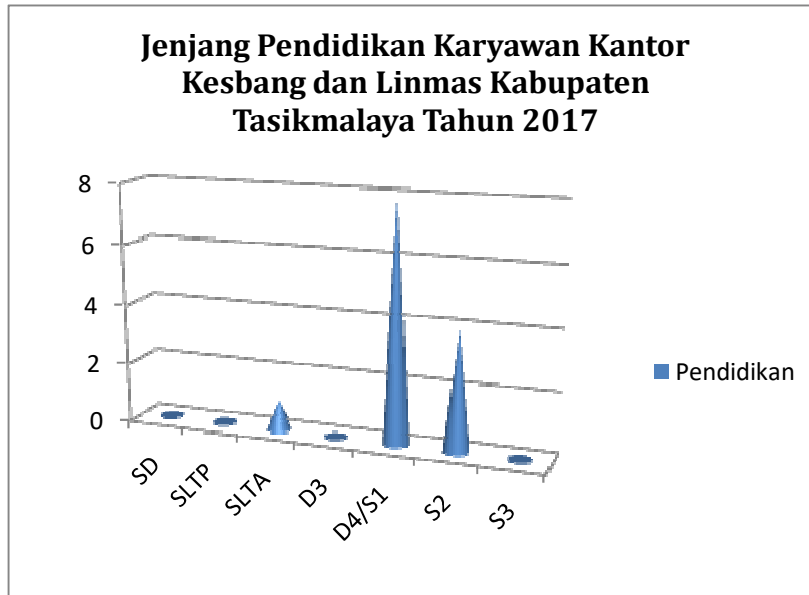
Dari jumlah pegawai diatas ada beberapa yang sedang dalam tahap proses melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Untuk S2 sebanyak 4 orang dan S1 sebanyak 1 orang yang telah lulus dan 3 orang masih menempuh pendidikan ke S2.

**Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

NO	UNIT KERJA	JUM LAH	TINGKAT PENDIDIKAN										DATA TIDAK ADA	KET
			S3	S2	S1	D3	D2	SLT A	SLT P	SD	NON SD			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
2	Kepala Sub Bagian Tata Usaha	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	Pelaksana Sub Bagian Tata Usaha	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Kepala Seksi HAL dan PMA	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Pelaksana Seksi HAL dan PMA	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
6	Kasi Tahbang dan SDM	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Pelaksana Seksi Tahbang dan SDM	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kasi Linmas	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pelaksana Seksi Linmas	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	

10	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	-	2	9	-	-	2	-	-	-	-	-

Sumber : Subag Tata Usaha Per Aparil 2016



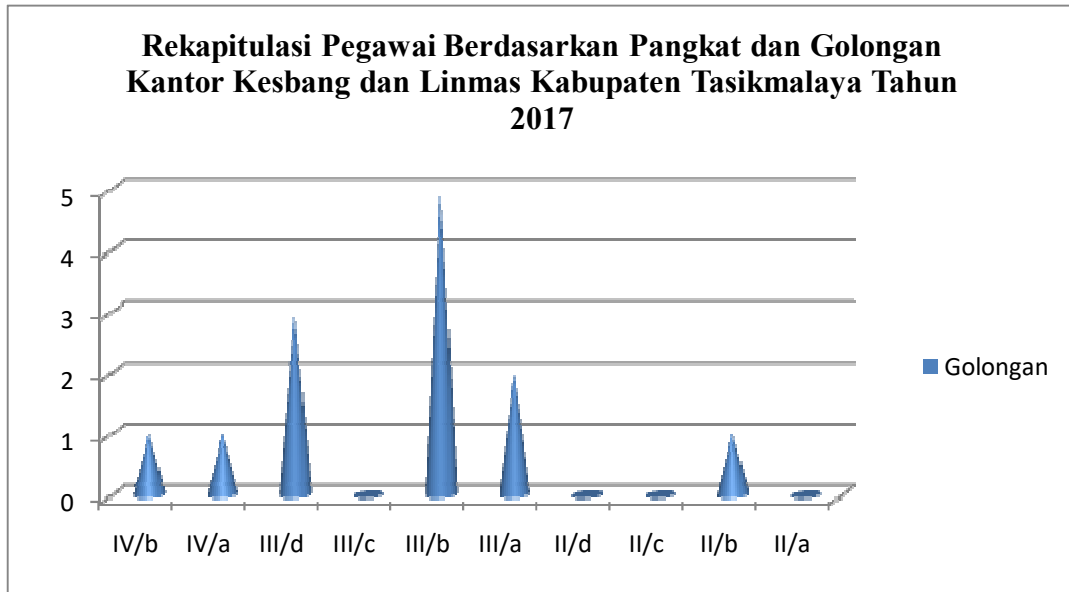
**Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Berdasarkan Jenis Kelamin**

NO	UNIT KERJA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	2	3	4	5
1	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	1	-	1
2	Sub Bagian Tata Usaha	4	-	4
3	Seksi HAL dan PMA	3	-	3
4	Seksi Tahbang dan SDM	2	1	3
5	Seksi Linmas	1	1	2
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-
Jumlah Total		11	2	13

Sumber : Subag Tata Usaha Per April 2016

**Rekapitulasi Pegawai Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017
Berdasarkan Pangkat dan Golongan Ruang**

NO	UNIT KERJA	JUMLAH	PANGKAT DAN GOLONGAN RUANG										DATA TIDAK ADA	KET
			IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Sub Bagian Tata Usaha	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
3	Seksi HAL dan PMA	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	Seksi Tahbang dan SDM	3	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
5	Seksi Linmas	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Kelompok Jabatan Fungsional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total		13	1	1	3	-	5	2	-	-	1	-	-	-
%		100	7,69	7,69	23,07	-	38,46	15,38	-	-	7,69	-	-	-



Sumber : Subag Tata Usaha Per April 2016

1.5 . SISTIMATIKA PENULISAN

Sistimatika penulisan Rencana Kerja Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017, ini disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab – bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Susunan Kepegawaian dan Perlengkapan

1.5 Sitematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN, SASARAN, ROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2016

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2016 dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi dapat diartikan secara luas ataupun secara sempit hal ini dapat terlihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan dihasilkan, penilaian atas pencapaian hasil, penilaian atas aktivitas, program, kebijaksanaan dan keselarasan tujuan dan sasaran dengan visi misi organisasi, penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang – undangan, penilaian pelaksanaan tugas, penilaian kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berorientasi pada RPJMD Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 -2020 dan Rencana Strategis Kabupaten Tasikmalaya 2016 – 2020 yang menjadikan landasan perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah dibidang Kesatuan Bangsa dan Lingkungan Masyarakat yang disusun menjadi program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Kantor Kesbang dan Linmas Tahun 2017 sehingga dapat terukur keberhasilannya. Pengukuran kinerja atas kebijakan dan program serta kegiatan yang dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana dengan realisasi dari setiap indikator kinerja yang ditetapkan dan pengukuran kinerja diuraikan melalui matrik.

INDIKATOR CAPAIAN KINERJA KANTOR KESBANG DAN LINMAS

KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2016

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Awal RPJMD	TAHUN 2015		TAHUN 2016	
				TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
	Terlaksananya pertemuan Komunitas Intelegen Daerah (KOMINDA)	Frekuensi	0	6	6	6	6
	Terlaksananya siskamswakarsa di daerah	orang	0	78	78	78	78
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	orang	0	275	300	500	601
	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan	orang	0	195	50	200	200
	Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	%	52.55	52.55	52.55	52.55	52.55
	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten	%	0.525	0.525	0.525	0.525	0.525
	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba	orang	100	200	200	100	0
	Kegiatan pembinaan politik daerah :						
	Partisipasi Pemilihan Bupati/Wakil Bupati	%	60.33	66,92	60,32	0	0
	Partisipasi Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	%	65.94	0	0	0	0
	Partisipasi Pemilihan Legislatif	%	73.54	0	0	0	0
	Partisipasi Pemilihan Presiden/Wakil Presiden	%	68.61	0	0	0	0
	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	orang	800	800	300	0	0
	Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlinmas	orang	0	0	0	78	0

Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan tugas fungsinya mengacu pada Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 43 tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang merupakan tindak lanjut

Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya. Tugas pokok Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya sebagaimana amanat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya yakni melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang kesatuan bangsa, politik dalam negeri dan perlindungan masyarakat serta tugas lain yang diberikan Bupati.

Sebagaimana peraturan tersebut di atas, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya pada Tahun 2016 sesuai dengan tugas pokok yang diemban memiliki indikator capaian sasaran kinerjanya yaitu Terwujudnya kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat mencakup:

- 1) Hal ini bisa dilihat dari jumlah masyarakat yang telah ikut serta untuk mewujudkan kehidupan politik yang demokratis dan meningkatnya partisipasi masyarakat. Dalam pencapaian ini Kantor Kesbang dan Linmas memiliki Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dengan indikator terlaksananya pertemuan Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) sebanyak 6 kali dan dapat terealisasi. Kominda sebagai forum komunikasi dan koordinasi unsur intelegen dan unsur Pimpinan Daerah di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk mendukung terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif di daerah maka dilakukan Rapat koordinasi untuk Tim Penanganan Konflik Daerah.
- 2) Peningkatan Kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah ditargetkan 78 delapan orang (2 angkatan) terlealisasi 100%. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu peserta anggota satlinmas.
- 3) Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa ini terdiri dari Kegiatan Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa sebanyak

100 orang, Kegiatan Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa sebanyak 100 orang, Kegiatan Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini sebanyak 50 orang, Kegiatan Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa sebanyak 351 orang. Jadi total jumlah orang yang mengikuti program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa sebanyak 601 orang.

- 4) Jumlah orang yang mengikuti Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan sebanyak 200 orang yang terdiri dari kegiatan Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama sebanyak 100 orang Pembinaan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan sebanyak 100 orang sehingga terelaisasi 200 orang. Adapun peserta kegiatan berasal dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan dalam rangka untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan sebagai langkah awal bagi masyarakat untuk meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan.
- 5) Untuk indikator jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi narkoba dan Sosialisasi pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam bagi Satlinmas pada Tahun 2016 tidak terealisasi karena tidak teranggarkan.

Keberhasilan :

1. Adanya Kerangka Acuan Kegiatan yang jelas dalam pelaksanaan kegiatan
2. Program yang dilaksanakan tepat sasaran sehingga menunjang pencapaian kinerja organisasi

Permasalahan :

1. Sinkronisasi antara Rencana Strategis yang masih terus berubah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Solusi :

1. Kominten bersama antara SKPD dengan pimpinan untuk menjalankan targetan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian Kinerja							Urusan Bidang	SKPD Penanggung jawab
		Kondisi Awal (2016)	Th 1 (2017)	Th 2 (2018)	Th 3 (2019)	Th 4 (2020)	Th 5 (2021)	Kondisi Akhir		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	%	100	100	100	100	100	100	100%	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100%	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya disiplin aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100%	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	%	100	100	100	100	100	100	100%	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya kinerja kualitas laporan	Dokumen /Laporan	0	19	20	20	20	20	99	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran	Dokumen /Laporan	1	1	4	3	3	4	15	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	Orang	350	1067	850	850	850	850	4467	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya sosialisasi kemitraan wawasan kebangsaan	Orang	100	0	0	100	100	100	300	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas

Meningkatnya penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba	Orang	0	350	200	200	200	200	1150	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Orang	351	0	0	0	0	0	0	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kali	7	8	7	8	8	8	39	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas
Meningkatnya Pembinaan/pendidikan masyarakat	Kali	9	36	46	47	45	46	220	Kesbang dan Linmas	Kesbang dan Linmas

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- 1) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan
- 2) menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara
- 3) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
- 4) Makin tinggi dan beragam tingkat kriminalitas di masyarakat
- 5) Partisipasi masyarakat dalam mendukung ketentraman dan ketertiban makin menurun
- 6) Sosialisasi regulasi tentang ketentraman dan ketertiban belum dapat dilaksanakan sampai tingkat bawah
- 7) Pelanggaran peraturan daerah makin meningkat
- 8) Keterbatasan jumlah anggota satpol PP dan PPNS
- 9) Belum optimalnya pembinaan Satuan LINMAS

Permasalahan lain yang dihadapi antara lain :

- 1) Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga politik;
- 2) Partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengambilan kebijakan publik masih rendah;
- 3) Lembaga politik belum memberikan secara maksimal proses peningkatan kesadaran politik warga (pendidikan politik);

- 4) Meningkatnya potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan;
- 5) Menurunnya wawasan kebangsaan dan kesadaran bela Negara;
- 6) Berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan terhadap kekayaan Negara;
- 7) Adanya tindakan-tindakan kelompok masyarakat yang bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;
- 8) Masih tingginya tingkat kriminalitas di masyarakat;
- 9) Munculnya paham radikalisme dan terorisme;
- 10) Lemahnya pemantauan dan pengawasan orang asing, ormas asing dan tenaga kerja asing.

Agar upaya pencapaian tujuan dan misi tersebut di atas dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta lebih terfokus maka perlu ditetapkan faktor-faktor kunci keberhasilan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya yang dirumuskan melalui metoda analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*) terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi.

1. Analisis Lingkungan Internal

a) Kekuatan

a.1 Tersedianya job description yang jelas, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas Unit Di Lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya

- a.2 *Terbangunnya Koordinasi pelaksanaan tugas antar unit kerja*** sesuai dengan wewenang, tugas dan fungsi masing-masing.
- a.3 *Tersedianya pedoman umum perencanaan pembangunan daerah (RPJPD dan RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya***, yang berisi Visi, Misi, dan Program Pembangunan Daerah Kabupaten Tasikmalaya khususnya dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan Politik Dalam negeri.
- b) Kelemahan**
- b.1 *Kondisi SDM yang kurang memadai***, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas. Dari sisi kualitas, SDM Kantor Kesatuan Bangsa dan Lingkungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan peningkatan kompetensi dan profesionalisme, mengingat masih banyak personil yang kurang memiliki latar belakang pendidikan, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman sesuai kualifikasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Sedangkan dari sisi kuantitas, belum seluruh formasi jabatan memiliki staf pendukung sebagaimana Job Spesification Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya yang ideal. Sehingga dalam menyelesaikan tugas terkadang masih dibantu oleh bidang lain karena kurangnya personil terutama untuk tenaga fungsional.
- b.2 *Keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.***

b.3 Masih sangat minimnya kemampuan organisasi dalam program peningkatan kompetensi aparatur melalui penyertaan Diklat Teknis dan Fungsional di dan ke luar Daerah.

b.4 Masih terbatasnya data dan informasi, sistem dan implementasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang lengkap, akurat dan akuntabel.

2. Analisis Lingkungan Ekstrenal

a) Peluang

a.1 Otonomi Daerah yang diperluas berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebagaimana telah di ubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008. Dengan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Kabupaten Tasikmalaya mempunyai keleluasaan untuk menyelenggarakan urusan wajib pemerintahan dengan kewenangan yang bulat dan utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi sebagai salah satu lembaga teknis daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Pembangunan politik dalam negeri.

a.2 Potensi Daerah, jumlah penduduk yang cukup besar dan budaya masyarakat yang religius, merupakan peluang bagi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tsikmalaya untuk mengembangkan eksistensinya.

a.3 Keterbukaan kesempatan untuk peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan latihan teknis fungsional, baik yang

diselenggarakan oleh institusi Pemerintah Pusat, Propinsi Jawa Barat, Perguruan Tinggi (Negeri, Swasta) maupun Organisasi Non Pemerintah (LSM) terutama yang berkaitan erat dengan penunjang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

a.4 Ketersedian konstitusi dan peraturan perundang undangan yang menjadi landasan hukum bagi operasionalisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

b) Ancaman/Tantangan

b.1 Masih lemahnya system koordinasi, komunikasi, informasi dan edukasi antara lembaga suprastruktur dan infra struktur politik di daerah.

b.2 Maraknya forum-forum diskusi Ipoleksosbud hankam sebagai bentuk manifestasi kebebasan berserikat berkumpul menyatakan pendapat yang dalam pelaksanaannya tidak jarang cenderung kebablasan dan mengabaikan etika dan moral kepatutan.

b.3 Masih sering terjadinya perselisihan (konflik) antar maupun inter lembaga partai politik, Ormas, Orsos, LSM dan lembaga non pemerintah lainnya, sebagai konsekuensi dari kurangnya pemahaman makna demokrasi dan wawasan kebangsaan berdasarkan nilai nilai Pancasila dan UUD 1945.

b.3. Masih kurangnya tingkat pendidikan rata-rata penduduk, rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, menurunnya rasa

kebangsaan dan bela Negara, serta dalam pelaksanaan berbagai bidang pembangunan daerah.

b.4 Meningkatkan gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan merebaknya berbagai kerusuhan dan unjukrasa ketidakpuasan masyarakat, tindak kriminal dan berbagai penyakit masyarakat.

b.5 Kespesatan Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan informasi di era globalisasi dengan berbagai akses yang menyertainya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD Tahun 2017

No.	KEGIATAN	PRIORITAS Daerah	BIAYA (Rp.)			
			APBD Kab/Kota	APBD Prov	APBN/H PLN	Total
1	2	3	4	5	6	7
1.	Program Pelayanan Administrasi					
	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air dan Listrik		20.000.000			20.000.000
	Penyedia Alat Tulis Kantor		35.000.000			35.000.000
	Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan		35.000.000			35.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		20.000.000			20.000.000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan		6.000.000			6.000.000
	Penyediaan Makanan dan Minuman		30.000.000			30.000.000
	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		24.000.000			24.000.000

	Rapat-Rapt Koordinasi dan Konsultasi		130.000.000			130.000.000
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur					
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor		20.000.000			20.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional		150.000.000			150.000.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor		18.000.000			18.000.000
3.	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					
	Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial		150.000.000			150.000.000
4.	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur					
	Pengiriman Peserta Diklat Teknis		30.000.000			30.000.000
4.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		80.000.000			80.000.000
5	Perencanaan dan Penggaran SKPD					
	Pengadaan Kendaraan dinas (mobil)	Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Tasikmalaya	450.000.000		2.700.000.000	3.150.000.000
	Pengadaan kendaraan dinas (sepeda motor)	Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Tasikmalaya	60.000.000		360.000.000	420.000.000
	Pengadaan Handy Talky,Reviter		130.000.000			130.000.000

6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan					
	Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan SKPD	Kantor Kesbang dan Linmas Kab.Tasikmalaya	75.000.000			75.000.000
7	Peningkatan keamanan dan keamanan lingkungan					
-	Analisa Evaluasi Informasi Strategis	Kab.Tasikmalaya	250.000.000			250.000.000
-	Analisis Evaluasi Kebijakan Strategis	Kab.Tasikmalaya	250.000.000			250.000.000
-	Pengendalian keamanan lingkungan	Kab.Tasikmalaya	250.000.000	-	-	250.000.000
-	Penanganan Konflik Sosial	Kab.Tasikmalaya	200.000.000	-	-	200.000.000
8	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan					
-	Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Kab.Tasikmalaya	200.000.000	-	-	200.000.000
-	Pendidikan Bela Negara	Kab.Tasikmalaya	350.000.000			350.000.000
-	Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Kab.Tasikmalaya	200.000.000	-	-	200.000.000
-	Orientasi Wasbang, Tahbang, dan Deteksi Dini	Kab.Tasikmalaya	50.000.000	-	-	50.000.000
-	Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa	Kab.Tasikmalaya	150.000.000			1.500.000.000
-	Pembentukan FPWK(Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan)		150.000.000	-	-	150.000.000
9	Kemitraan Pengembangan wawasan Kebangsaan					
-	Fasilitasi pencapaian holaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	Kab.Tasikmalaya	250.000.000	-	-	250.000.000

10	Program Pendidikan Politik Masyarakat					
-	Diseminasi Kebijakan Ormas, LSM dan OKP	Kab. Tasikmalaya	200.000.000	-	500.000.000	700.000.000
-	Dukungan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur	Kab. Tasikmalaya	750.000.000	1.500.000.000		2.250.000.000
-	Kegiatan Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Kab. Tasikmalaya	50.000.000	-	-	50.000.000
-	Bintek Kader Parpol	Kab. Tasikmalaya	250.000.000		500.000.000	750.000.000
	Fasilitasi Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan	Kab. Tasikmalaya	50.000.000	-	-	50.000.000
	Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Kab. Tasikmalaya	25.000.000	-	-	25.000.000
-	Jambore Ormas/LSM se Kab. Tasikmalaya	Pendidikan politik masyarakat	500.000.000	-	-	500.000.000
-	Sosialisasi Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintahan di Daerah	Kab. Tasikmalaya	200.000.000			200.000.000
-	Bintek Keuangan Parpol	Kab. Tasikmalaya	50.000.000	-	-	50.000.000
11	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)					
-	Penyuluhan Pencegahan Peredaran/ Penanggulangan Minuman Keras dan Narkoba	Kab. Tasikmalaya	200.000.000			200.000.000
12	Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD					
-	Fasilitasi Kajian Kelembagaan Kesbangpol	Kab. Tasikmalaya	100.000.000			100.000.000
JUMLAH			6.138.000.000		4.060.000.000	13.048.000.000

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam menjalankan kerjanya Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya juga membuka ruang – ruang untuk diskusi public. Untuk masukan bisa dilakukan secara langsung atau lewat tertulis. Untuk menunjang keberlangsungan program dan kegiatan usulan yang berasal dari para pemangku kepentingan.baik dari kelompok masyarakat terkait. Untuk Kabupaten Tasikmalaya penjangingan aspirasi dilakukan melalui musrenbang. Usulan tersebut dijadikan sebagai salah satu rekomendasi bagi penyelenggara pemerintahan agar sesuai dengan harapan masyarakat.

Untuk lebih menjangir aspirasi masyarakat, Kantor Kesbang juga telah membuka website tersendiri yang terkoneksi secara langsung dengan SKPD lain yang bisa diakses melalui www.tasikmalayakab.go.id. Dengan selalu di up datenya website keterbukaan pemerintah dalam menjangir aspirasi masyarakat akan lebih mudah. Sejauh ini untuk usulan program dan kegiatan masyarakat lebih dititik tekankan pada penyelesaian konflik vertical dan horizontal karena hal ini akan mengganggu stabilitas keamanan masyarakat. Gangguan ketertiban dan ketentraman masyarakat yang sering terjadi di Kabupaten Tasikmalaya memerlukan penanganan yang berkesinambungan serta terintegrasi antara aparat ketentraman daerah, yang bekerja sama dengan perangkat satuan polisi pamong praja, aparat perlindungan masyarakat dan ketahanan lingkungan keluarga masing – masing serta segenap komponen masyarakat.

Selanjutnya konflik antar dan internal umat beragama yang mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan bisa dikendalikan sampai saat ini. Hal ini tidak terlepas dari peran serta ulama dan umaro dalam mengayomi umat beragama di Kabupaten

Tasikmalaya. Kondisi tersebut bisa dilihat dalam indikator peningkatan fasilitas pencapaian halaqoh dalam berbagai forum keagamaan. Kesiapan petugas dalam deteksi dini dan penanggulangan tanggap darurat bencana juga memadai hal ini ditandai dengan jumlah anggota linmas tiap desa dengan populasi cukup disertai dengan pelatihan ketrampilan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan personal linmas dalam melayani masyarakat khususnya korban bencana alam. Biasanya masukan yang disampaikan oleh masyarakat pada saat pelaksanaan program dan kegiatan sedang berjalan agar kegiatan yang dilaksanakan ada tindak lanjutnya. Untuk saat ini Linmas sudah tidak berada lagi pada SOTK baru dan beralih ke Satpol PP.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota bahwa urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri menjadi urusan wajib bagi pemerintah Kabupaten terutama yang berkaitan dengan standar pelayanan dasar. Untuk target standar pelayanan minimal di kota/kabupaten yang berhubungan dengan Pemerintahan Dalam Negeri jenis pelayanan dasar yaitu pemeliharaan ketertiban dan ketentraman masyarakat dengan indikator cakupan petugas linmas dengan. Ada dua program nasional untuk cakupan kesbang dan linmas antara lain :

1. Program pemberdayaan potensi keamanan
2. Program pemeliharaan kamtibmas

Untuk tahun 2017 program nasional tersebut jabarkan kembali ke dalam program dan kegiatan yang ada di daerah. Adapun program dan kegiatan tersebut sebagai berikut :

NO	Program Nasional	Program Kabupaten	Kegiatan Kabupaten
1.	Pemberdayaan Potensi Keamanan	Peningkatan Keamanan Lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian Keamanan Lingkungan - Penanganan Konflik Sosial - Penguatan Pengawasan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Tenaga Kerja Asing
2.	Pemeliharaan Kamtibmas	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama - Peningkatan Kesadaran

			<p>Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa - Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa, dan Deteksi Dini - Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Bagi Pelajar - Peningkatan Kesadaran Bela Negara - Ekspedisi Budaya dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan
		Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	<ul style="list-style-type: none"> - Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba
		Pendidikan Politik Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Diseminasi Arah Kebijakan Ormas, LSM dan OKP - Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah - Evaluasi Penagjuan Hibah dan Bantuan Sosial dan Orkesmas - Verfikasi Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik - Sinergitas Hubungan AntarLembaga Pemerintahan di daerah di Bidang Ilmu Politik

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD berdasarkan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja						
			Kondisi Awal (2016)	Th 1/2017	Th 2/2018	Th 3/2019	Th 4/2020	Th 5/2021	Kondisi Akhir
3	4	7	8	9	10	9	10	11	13
Meningkatnya efektivitas pelayanan, kepercayaan dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya cakupan penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kesbang dan Linmas	1 % Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		2 % Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		3 % Cakupan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		4 Jumlah dokumen/laporan perencanaan dan penganggaran	22 Dokumen /Laporan	20 Dokumen /Laporan	24 Dokumen/Laporan	23 Dokumen/Laporan	23 Dokumen /Laporan	24 Dokumen/Laporan	114 Dokumen/Laporan
Meningkatnya kebebasan politik masyarakat dalam	1	Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan politik dan keamanan lingkungan	16 kali	44 kali	53 kali	61 kali	53 kali	57 kali	268 kali

	kehidupan berbangsa dan bernegara	2	Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa	801 orang	1417 orang	632 orang	880 orang	880 orang	880 orang	4689 orang
--	---	---	--	-----------	---------------	--------------	-----------	-----------	--------------	------------

Program dan Kegiatan Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra)

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	CAPAIAN ORGANISASI	
			Target2017	Rp.
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	196.540.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	14.625.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	29.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	18.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi pegawai kantor dan masyarakat	100%	100%	5.390.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya sajian makanan dan minuman untuk tamu kantor	100%	100%	26.440.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	0	0	0
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenaga petugas piket/waker pemelihara keamanan kantor	1 orang petugas piket/waker	2 orang petugas piket/waker	24.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan koordinasi	100%	100%	49.085.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	191.449.500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	0	0	0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan kantor	100%	100%	45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan baku bangunan berikut jasa tukang	100%	100%	22.109.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	115.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	9.240.000
Program Peningkatan Displin Aparatur			100%	36.985.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya	0	pakaian dinas untuk 20 orang	36.985.500
Pengadaan Seragam Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	4.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek	0	1 orang	4.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			19 dokumen/laporan	50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dengan baik dan tepat waktu	0	0	0
Penyusunan Laporan Keuangan/Tahunan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan dan laporan bulanan/tahunan SKPD dengan baik dan tepat waktu	0	19 laporan/dokumen	50.000.000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD			1 dokumen/laporan	27.000.000
Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	0	0
Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Teverifikasinya permohonan belanja Hibah dan Bantuan Sosial	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya DPA dan RKA SKPD	0	0	0

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD	0	1 Dokumen	27.000.000
Evaluasi Kelembagaan Kesbang				
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		350 orang	1067 orang	570.400.000
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan	100 orang	50 orang	30.000.000
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	100 orang	100 orang	191.400.000
Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini	Jumlah orang yang terkirim untuk mengikuti orientasi	50 orang	39 orang	30.000.000
Fasilitasi Bela Negara dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Toga, Toma, Ormas dan OKP	Jumlah perwakilan toga,toma,ormas dan OKP yang mengikuti fasilitasi bela negara	0	0	0
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Bagi Pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	0	750 orang	250.000.000
Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan bela negara	0	50 orang	29.500.000
Ekpedisi Budaya dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang (Tokoh Budaya/Seni) yang mengikuti sosialisasi ketahanan bangsa	0	39 orang	19.500.000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pertemuan/rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 orang	39 orang	20.000.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0'	0'
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0'	0'	0'
Pembinaan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Toga dan Tomas yang terbina	0	0'	0'

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa		350 orang	150.000.000
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah orang yng mengikuti sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan narkoba	0	350 orang	150.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan		351 orang	0'	0'
Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan ketahanan bangsa	351 orang	0'	0'
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			8 kali	219.375.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pertemuan/rapat Kominda	6 kali	6 kali	160.000.000
Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pertemua/Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik	1 kali	1 kali	49.750.000
Penguatan Pengawasan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Teanga Kerja Asing	Jumlah Ormas/Orang asing yang teridentifikasi	0	1 kali	9.625.000
Fasilitasi Bela Negara dalam Peningkatan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga	Jumlah pertemuan/rapat hubungan antar lembaga	0	0'	0'
Program Pendidikan Politik Masyarakat		9 kali	36 kali	354.250.000
Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah di Daerah di Bidang Politik	Jumlah Rapat/Pertemuan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga	1 kali	1 kali	84.625.000
Diseminasi Arah Kebijakan Ormas,LSM Dan OKP	Jumlah pembinaan ormas/LSM dan OKP	0	1 kali	39.625.000
Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Barat		1 kali	200.000.000
Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Terselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden			
Sosialisasi Pemilihan Legislatif	Terselenggaranya pemilihan legislatif			

Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
Evaluasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Orkesmas yang telah diverifikasi	0	25 orkesmas	15.000.000
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah diskusi yang dilaksanakan	0		
Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah Parpol yang diverifikasi	8 parpol	8 parpol	15.000.000

Rencana Kerja Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

PROGRAM/KEGIATAN	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	CAPAIAN ORGANISASI	
			Target2017	Rp.
1	2	3	4	5
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			100%	196.540.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	100%	14.625.000
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	100%	100%	30.000.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	29.000.000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	18.000.000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya bahan bacaan dan informasi pegawai kantor dan masyarakat	100%	100%	5.390.000
Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya sajian makanan dan minuman untuk tamu kantor	100%	100%	26.440.000
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Tersedianya jasa tenaga pendukung administrasi/teknis perkantoran	0	0	0
Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan tenaga petugas piket/waker pemelihara keamanan kantor	1 orang petugas piket/waker	2 orang petugas piket/waker	24.000.000
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Terlaksananya dan terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan koordinasi	100%	100%	49.085.000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			100%	191.449.500
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Tersedianya kendaraan dinas/operasional kantor	0	0	0
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya peralatan kantor untuk menunjang kegiatan kantor	100%	100%	45.000.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Tersedianya bahan baku bangunan berikut jasa tukang	100%	100%	22.109.500

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	100%	100%	115.100.000
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	100%	100%	9.240.000
Program Peningkatan Displin Aparatur			100%	36.985.500
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya	Tersedianya pakaian dinas pegawai beserta perlengkapannya	0	pakaian dinas untuk 20 orang	36.985.500
Pengadaan Seragam Olah Raga	Tersedianya pakaian olah raga bagi pegawai			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			100%	4.000.000
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terkirimnya pegawai untuk mengikuti diklat/bimtek	0	1 orang	4.000.000
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			19 dokumen/laporan	50.000.000
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun dengan baik dan tepat waktu	0	0	0
Penyusunan Laporan Keuangan/Tahunan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan dan laporan bulanan/tahunan SKPD dengan baik dan tepat waktu	0	19 laporan/dokumen	50.000.000
Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD			1 dokumen/laporan	27.000.000
Penyusunan Renstra SKPD	Tersedianya dokumen Renstra SKPD	1 dokumen	0	0
Evaluasi Permohonan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	Teverifikasinya permohonan belanja Hibah dan Bantuan Sosial	100%		
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Tersedianya DPA dan RKA SKPD	0	0	0

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD	Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Renja) SKPD	0	1 Dokumen	27.000.000
Evaluasi Kelembagaan Kesbang				
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan		350 orang	1067 orang	570.400.000
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Beragama	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peningkatan toleransi dan kerukunan	100 orang	50 orang	30.000.000
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	100 orang	100 orang	191.400.000
Orientasi Wasbang, Tahbang, Pembauran Bangsa dan Deteksi Dini	Jumlah orang yang terkirim untuk mengikuti orientasi	50 orang	39 orang	30.000.000
Fasilitasi Bela Negara dan Penguatan Wawasan Kebangsaan Bagi Toga, Toma, Ormas dan OKP	Jumlah perwakilan toga,toma,ormas dan OKP yang mengikuti fasilitasi bela negara	0	0	0
Pemahaman Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Bangsa Bagi Pelajar	Jumlah pelajar yang mengikuti sosialisasi wawasan kebangsaan	0	750 orang	250.000.000
Peningkatan Kesadaran Bela Negara	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan bela negara	0	50 orang	29.500.000
Ekpedisi Budaya dalam Upaya Peningkatan Ketahanan Bangsa dan Wawasan Kebangsaan	Jumlah orang (Tokoh Budaya/Seni) yang mengikuti sosialisasi ketahanan bangsa	0	39 orang	19.500.000
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-Nilai Luhur Budaya Bangsa	Jumlah pertemuan/rapat Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)	100 orang	39 orang	20.000.000
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan			0'	0'
Pentas Seni dan Budaya, Festival, Lomba Cipta dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Terselenggaranya pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan	0'	0'	0'
Pembinaan Pencapaian Halaqoh dan Berbagai Forum Keagamaan Lainnya dalam Upaya Peningkatan Wawasan Kebangsaan	Jumlah Toga dan Tomas yang terbina	0	0'	0'

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Meningkatnya pemahaman wawasan kebangsaan dan ketahanan bangsa		350 orang	150.000.000
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/Penggunaan Minuman Keras dan Narkoba	Jumlah orang yng mengikuti sosialisasi pencegahan peredaran/penggunaan narkoba	0	350 orang	150.000.000
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Koordinasi dan Evaluasi Keamanan Lingkungan		351 orang	0'	0'
Pembinaan Kesadaran Hukum dan Ketahanan Bangsa	Terselenggaranya kegiatan pembinaan kesadaran hukum dan ketahanan bangsa	351 orang	0'	0'
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			8 kali	219.375.000
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah pertemuan/rapat Kominda	6 kali	6 kali	160.000.000
Penanganan Konflik Sosial	Jumlah pertemua/Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik	1 kali	1 kali	49.750.000
Penguatan Pengawasan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, Lembaga Asing dan Teanga Kerja Asing	Jumlah Ormas/Orang asing yang teridentifikasi	0	1 kali	9.625.000
Fasilitasi Bela Negara dalam Peningkatan Koordinasi Hubungan Antar Lembaga	Jumlah pertemuan/rapat hubungan antar lembaga	0	0'	0'
Program Pendidikan Politik Masyarakat		9 kali	36 kali	354.250.000
Sinergitas Hubungan Antar Lembaga Pemerintah di Daerah di Bidang Politik	Jumlah Rapat/Pertemuan Sinergitas Hubungan Antar Lembaga	1 kali	1 kali	84.625.000
Diseminasi Arah Kebijakan Ormas,LSM Dan OKP	Jumlah pembinaan ormas/LSM dan OKP	0	1 kali	39.625.000
Sosialisasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Jawa Barat	Terselenggaranya pemilihan umum kepala daerah Provinsi Jawa Barat		1 kali	200.000.000
Sosialisasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	Terselenggaranya pemilihan presiden dan wakil presiden			
Sosialisasi Pemilihan Legislatif	Terselenggaranya pemilihan legislatif			

Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	Terselenggaranya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati			
Evaluasi Pengajuan Hibah dan Bantuan Sosial	Jumlah Orkesmas yang telah diverifikasi	0	25 orkesmas	15.000.000
Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik	Jumlah diskusi yang dilaksanakan	0		
Verifikasi Pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	Jumlah Parpol yang diverifikasi	8 parpol	8 parpol	15.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Tasikmalaya merupakan pedoman dan acuan rencana kerja pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas selama satu tahun anggaran sekaligus merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan.

Dalam kerangka perencanaan secara menyeluruh, Rencana Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Linmas merupakan bagian integral dari perencanaan pemerintah kabupaten Tasikmalaya dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Tasikmalaya.

Dengan demikian keberadaan Renja SKPD sebagai penjabaran dari perencanaan pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra merupakan pedoman penting dan mendasar bagi SKPD dalam setiap rencana kerja yang ditetapkan.

Akhirnya, perencanaan yang baik dapat dikatakan bermanfaat manakala perencanaan yang ditetapkan tersebut dapat benar-benar diaplikasikan secara baik, tepat sasaran, efektif dan efisien serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan.